

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan finansial di masa pensiun menjadi isu krusial bagi pegawai di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pensiun tidak lagi sekadar dimaknai sebagai berhentinya aktivitas kerja akibat usia, melainkan sebagai fase kehidupan yang memerlukan kesiapan finansial yang matang untuk menjamin keberlangsungan hidup pasca-produktif (Maria Rio Rita, Yeterina Widi Nugrahanti, 2024). Banyak individu menghadapi kekhawatiran akan kekurangan dana seiring meningkatnya harapan hidup dan biaya kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan pensiun dipandang sebagai faktor kunci dalam memastikan transisi yang sukses menuju masa tua yang sejahtera (Sun & Xiong, 2023).

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat dalam melakukan sesuatu disebabkan oleh tiga aspek utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan *perceived Behavioral control*. Ketiga konstruk tersebut relevan dalam memahami bagaimana individu memutuskan untuk melakukan perencanaan pension (Long et al., 2024). Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, diperlukan integrasi dimensi sosial dan struktural ke dalam model perilaku tersebut (Al-Mamary et al., 2024).

Salah satu faktor sosial yang penting adalah *Social Influence*, yang merupakan aspek utama dalam teori UTAUT. *Social Influence* menjelaskan sejauh mana individu merasakan tekanan atau dorongan sosial dari lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, rekan kerja, dan komunitas. Faktor ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan finansial, termasuk dalam

perencanaan pensiun (Hsu et al., 2021). Selain itu, *Social Influence* juga dapat memperkuat maupun memoderasi hubungan antara perilaku keuangan dan rencana pensiun (Al-Mamary et al., 2024).

Di samping faktor sosial, *government regulation* merupakan faktor struktural yang tidak kalah penting dalam memengaruhi perilaku perencanaan pensiun. Kebijakan pemerintah terkait pajak, insentif pensiun, serta ketentuan usia pensiun dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keputusan individu dalam mempersiapkan masa pensiun (Ekow Kelly & Palaniappan, 2022). Kebijakan pemerintah dapat memperkuat hubungan antara kejelasan tujuan pensiun dan perilaku perencanaan individu (Ji et al., 2023).

Dalam perspektif TPB, norma subjektif menekankan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pribadi, tetapi juga oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar (Phung et al., 2026). Dukungan sosial dari keluarga, rekan kerja, dan organisasi dapat membentuk persepsi serta mendorong individu untuk melakukan perencanaan pensiun secara lebih matang (C. Liu et al., 2022). Individu yang berada dalam lingkungan sosial yang mendukung cenderung memiliki tingkat kesiapan pensiun yang lebih baik dibandingkan mereka yang kurang mendapatkan dukungan sosial (Topa et al., 2018).

Lebih lanjut, pengaruh sosial dapat dijelaskan melalui konsep *Social Influence* yang menekankan bahwa individu cenderung menyesuaikan perilakunya berdasarkan norma dan ekspektasi kelompok sosialnya (Phung et al., 2026). Dalam konteks organisasi publik, interaksi antarpegawai serta budaya kerja dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam pengambilan keputusan terkait

perencanaan pensiun (Shin et al., 2025). Misalnya, diskusi mengenai investasi atau pengalaman pensiunan dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya persiapan pensiun (Lusardi & Mitchell, 2023).

Dalam konteks aparatur sipil negara, karakteristik pekerjaan di sektor publik yang cenderung stabil dan memiliki jaminan pensiun dari pemerintah dapat memengaruhi persepsi risiko individu (Ekow Kelly & Palaniappan, 2022). Pegawai negeri sipil yang merasa memiliki jaminan pensiun cenderung memiliki urgensi yang lebih rendah untuk melakukan perencanaan tambahan dibandingkan dengan pekerja sektor swasta (Shin et al., 2025). Kondisi ini dapat memengaruhi persepsi risiko dan urgensi perencanaan pensiun, pegawai negeri sipil yang merasa memiliki jaminan pensiun dari pemerintah cenderung memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah dalam melakukan perencanaan tambahan, dibandingkan dengan pekerja di sektor swasta yang lebih bergantung pada perencanaan individu (Mooney et al., 2021).

Dari sisi kebijakan publik, peraturan pemerintah memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku individu melalui penyediaan sistem, insentif, dan regulasi yang mendukung (Ji et al., 2023; M. Liu et al., 2024). Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan penerimaan individu terhadap kebijakan tersebut (Taofeeq et al., 2019). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sistem pensiun telah tersedia, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesiapan individu, terutama terkait kecukupan finansial dan kesiapan sosial (Harahap et al., 2022).

Selain itu, dinamika perubahan kebijakan pensiun menuntut adanya kemampuan adaptasi dari pegawai negeri sipil. Perubahan seperti penyesuaian usia pensiun atau reformasi sistem pembiayaan dapat memengaruhi persepsi dan perilaku individu dalam mempersiapkan masa pensiun (Ekow Kelly & Palaniappan, 2022; Xu et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesiapan pensiun individu.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya masih cenderung mengkaji faktor-faktor tersebut secara terpisah (Topa et al., 2018). Sebagian penelitian berfokus pada aspek finansial seperti literasi keuangan, sementara penelitian lain menitikberatkan pada aspek sosial atau psikologis (Lusardi, 2019; Yadav, 2023). Padahal, dalam kenyataannya, perilaku perencanaan pensiun merupakan hasil dari interaksi antara faktor struktural (Ekow Kelly & Palaniappan, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami keterkaitan kedua faktor tersebut (Maryam et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persiapan pensiun pada pegawai negeri sipil dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan, khususnya peraturan pemerintah dan faktor sosial (Topa et al., 2018). Peraturan pemerintah memberikan kerangka kebijakan, sedangkan faktor sosial memengaruhi bagaimana individu merespons dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam kehidupan nyata (Phung et al., 2026).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peraturan pemerintah dan faktor sosial terhadap persiapan pensiun di kalangan

pegawai negeri sipil. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan literatur di bidang perilaku keuangan, sekaligus menghasilkan implikasi praktis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintahan dan lingkungan sosial dalam upaya meningkatkan kesiapan pensiun aparatur sipil negara.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat di ketahui rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *regulasi pemerintah terhadap Attitude dan pbc*
2. Bagaimana pengaruh att, pbc dan *Social Influence* terhadap *Intention*.
3. Bagaimana pengaruh *Intention* terhadap behaviour.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh *regulasi pemeintah* terhadap *Attitude dan pbc* pada pegawai sektor publik.
2. Menjelaskan pengaruh *Attitude*, pbc dan *Social Influence* terhadap intensi pegawai sektor public dalam merencanakan masa pensiun.
3. Menjelaskan pengaruh *intensi* terhadap kebiasaan pegawai sektor public dalam menrenencanakan masa pensiun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perencanaan, khususnya pada bidang perilaku keuangan dan perencanaan pensiun. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan (TPB) dengan mengintegrasikan faktor eksternal berupa *Social Influence* yang diadopsi dari teori (UTAUT), serta *government regulation* sebagai faktor struktural. Integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan konsep yang lebih maju dalam menjelaskan perilaku perencanaan pensiun, tidak hanya dari aspek psikologis individu, tetapi juga dari aspek sosial dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam konteks negara berkembang khususnya Indonesia, yang masih sedikit terbatas dalam kajian terkait perencanaan pensiun pada aparatur sipil negara. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memperkaya literatur mengenai pendekatan multidimensional dalam memahami perilaku perencanaan pensiun.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif terkait sistem pensiun, termasuk dalam hal pemberian insentif serta strategi sosialisasi kepada aparatur sipil negara. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membentuk program edukasi dan pelatihan perencanaan keuangan guna meningkatkan kesiapan pensiun pegawai. Bagi aparatur sipil negara, penelitian ini diharapkan dapat memacu kesadaran akan

pentingnya perencanaan pensiun sejak dini serta mendorong pemanfaatan dukungan sosial dan kebijakan yang tersedia secara optimal. Selain itu, bagi praktisi keuangan, hasil penelitian ini bisa menjadi dasar dalam membuat produk dan layanan perencanaan pensiun yang lebih sesuai dengan minat pengguna. Terakhir, penelitian ini juga berharap dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian yang berkaitan dengan perilaku perencanaan pensiun dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

